BAB II

DETERMINED DEVELOPMENTAL ELITE & RELATIVE AUTONOMY of THE DEVELOPMENTAL STATE

Pada bab kedua ini akan dibahas mengenai siapa saja tokoh yang terlibat serta kebijakan apa saja yang dapat meningkatkan keberhasilan dari perkembangan industri otomotif mobil pedesaan. Tokoh-tokoh yang terlibat tidak hanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan namun terdapat beberapa lapisan sipil seperti perusahaan swasta, organisasi, serta masyarakat yang akan saling terintegrasi dalam melancarkan industri ini.

2.1 *Determined Developmental Elite*

Determined Developmental Elite merupakan indikator yang melihat siapa saja yang akan terlibat dalam pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan ini. Seperti yang telah diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo memiliki peran yang penting dalam berjalannya industri ini serta Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perekonomian selaku lembaga yang berada dibawah pemerintah merupakan aktor yang cukup penting dalam pengembangan industri ini. Di masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian langsung di bawah Presiden seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan pihak lain seperti Gaikindo, IOI dan pihak swasta lainnya saling bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan dalam hal industri otomotif Indonesia. Sehingga program seperti mobil pedesaan yang telah dikembangkan oleh Kementrian Perindustrian dan

perusahaan swasta seperti PT. Astra Otoparts Tbk. dalam mengembangkan AMMDes bisa berjalan dengan lancar hingga saat ini.

a. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo yang telah menjabat sejak tahun 2014 mendukung sektor industri otomotif seperti adanya pengembangan kendaraan pedesaan yang telah lama dicetuskan sejak pemerintah sebelumnya. Dukungan terus diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam membuat otomotif Indonesia terus berkembang dan dapat bersaing dalam dunia industri global. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah Presiden Joko Widodo dalam menangani perkembangan mobil ESEMKA sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Salah satu contoh dukungan yang Presiden Joko Widodo berikan sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Solo adalah dengan memakai kendaraan ESEMKA sebagai mobil dinas, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mobil ESEMKA dapat bersaing dengan mobil-mobil produksi negara lain (Raditya, 2019).

Presiden Joko Widodo juga mengikuti dan melihat perkembangan sektor otomotif Indonesia yang ditunjukkan pada ajang-ajang pameran otomotif seperti GIIAS dan juga IIMS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat para pelaku industri otomotif dalam negeri sekaligus sebagai upaya untuk memperkenalkan akan adanya kebijakan baru berupa pengembangan mobil pedesaan. Berbagai bentuk dukungan bagi para pemilik industri yang siap untuk terjun membantu kesuksesan mobil pedesaan ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui kementerian-

kementerian di bawahnya. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian insentif, keringanan pajak, hingga transfer teknologi guna percepatan produksi mobil pedesaan.

Pemberian dukungan yang telah disebutkan sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan *support* para pelaku industri, dan kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak dan kementerian yang berada langsung di bawah Presiden. Harapannya agar kebijakan mobil pedesaan ini bisa berjalan sesuai harapan dan dengan berbagai proteksi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga dapat membuat mobil pedesaan bisa bersaing dengan industri otomotif global.

b. Ruang lingkup di sekitar Presiden Joko Widodo

Perkembangan terkait berbagai sektor industri di Indonesia selain terdapat peran sentral Presiden Joko Widodo, juga tidak lepas dari pengaruh ruang lingkup yang terdapat di sekitar Presiden tersebut. Ruang lingkup ini dapat berisi pihak-pihak yang langsung berada di bawah otoritas Presiden seperti kementerian-kementerian, pihak-pihak non-negara seperti pihak swasta, pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat hingga organisasi-organisasi yang juga memiliki peran dan pengaruh dalam perkembangan industri mobil pedesaan di Indonesia.

Ketertarikan Presiden Joko Widodo dalam indusri otomotif dapat ditarik mundur pada saat beliau menjabat sebagai Walikota Solo dengan memberikan dukungan pada produk otomotif bernama ESEMKA. Kemudian ketika menjabat Presiden, dukungan dari berbagai pihak serta

kekuatan dalam menentukan arah kebijakan negara membuat Presiden Joko Widodo melanjutkan ke arah industri mobil pedesaan.

- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia

Kementrian Perindustrian selaku lembaga yang mengurusi kegiatan industri yang ada di Indonesia dan salah satu lembaga yang mengemukakan industri kendaraan pedesaan. Airlangga Hartarto sebagai salah seorang yang berada di lingkup Presiden Joko Widodo, merupakan orang yang menjabat Menteri Perindustrian dalam pemerintahan. Sebelumnya, Airlangga merupakan Ketua umum partai Golkar yang memiliki relasi kuat dengan partai pengusung Joko Widodo yaitu PDIP sehingga mendapat tempat dalam kementerian. Selain sebagai politisi, Airlangga juga memiliki sepak terjang sebagai pengusaha seperti menjadi Presiden Komisaris di PT. Fajar surya Wisesa, sehingga memiliki kemampuan dalam memanajemen kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri.

Kementerian Perindustrian di bawah arahan Airhangga Hartanto kemudian mengkoordinasikan kebijakan pengembangan industri otomotif mobil pedesaan kepada Kementrian Keuangan selaku lembaga yang mengurusi perihal perpajakan kepemilikan kendaraan bermotor. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia juga berada di ruang lingkup pemerintahan dan memiliki andil dalam perkembangan perkembangan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani memiliki sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala Bappenas dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Dr. Boediono pada tahun 2008. Sebagai

orang yang berpengalaman dalam bidang perekonomian, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan di merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian sehingga dapat membantu perkembangan industri otomotif mobil pedesaan.

- Perusahaan Otomotif Non-Pemerintah (PT. Astra Otoparts Tbk., PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia)

PT. Astra Otoparts Tbk. adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi serta pendistribusi rangkaian produk komponen otomotif baik di Indonesia maupun mancanegara (Astra, -). Rini Soemarno sebagai mantan Dirut Astra yang sekarang menjabat sebagai menteri BUMN juga merupakan tokoh-tokoh yang berada di lingkup Presiden Joko Widodo yang memiliki pengalaman sebagai salah satu petinggi PT. Astra internasional Indonesia. Rini pernah membawa PT. Astra dari kerugian pada tahun 1988 menjadi mengalami keuntungan pada tahun 1989 dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam upaya menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Saat ini PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (PT. KMWI) yang merupakan anak dari perusahaan PT. Astra International Tbk. yang berfokus terhadap industri otomotif mobil pedesaan (Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, -) juga turut melibatkan diri dalam pengembangan industri mobil pedesaan. Sehingga keterkaitan antara Rini Soemarno selaku Menteri BUMN dengan PT. KMWI dapat selaras dalam mendukung kebijakan pengembangan industri mobil pedesaan di Indonesia.

Perkembangan industri otomotif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Presiden Joko Widodo serta tokoh-tokoh elit politik yang berada di sekitar ruang lingkup Presiden. Tokoh-tokoh elit politik ini didukung dengan latar belakang yang mumpuni dalam menangani hal-hal berkaitan dengan industri, sehingga diharapkan dapat memperkuat perkembangan industri otomotif mobil pedesaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan kedepannya. Selain itu, para tokoh tersebut merupakan tokoh yang memiliki keinginan untuk memajukan industri otomotif Indonesia karena mobil nasional merupakan hal yang diinginkan oleh para elit serta masyarakat Indonesia dengan melihat antusias dari para elit yang ikut dalam merumuskan kebijakan industri mobil pedesaan.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Adrian Leftwich pada teori *Developmental States* yang dimana elit atau pemimpin harus memiliki ketertarikan terhadap kebijakan yang akan dibuat seperti contoh pada pembahasan ini yaitu industri mobil pedesaan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran pemerintah telah memenuhi kriteria yang ada pada teori *Developmental States* karena Presiden Joko Widodo telah memiliki ketertarikan terhadap mobil nasional bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selain Presiden Joko Widodo, Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian pada saat itu merupakan salah satu yang mengemukakan bahwa mobil pedesaan adalah kesempatan bagi Indonesia apabila ingin menjadi negara yang memiliki persaingan di dunia industri otomotif (Leftwich, 1995).

2.2 Relative Autonomy of The Developmental State

Masing-masing pemerintahan beserta jajaran elit tiap negara memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan terkait industri, namun kewenangan tersebut bersifat relatif dan seringkali memiliki batasan. Kewenangan dan batasan ini terkait erat dengan tingkatan jabatan dalam pemerintahan, secara nasional yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Peran pemerintah melingkupi peraturan administratif, subsidi, proteksi, hingga peninjauan pasar, dan Negara secara langsung terlibat dalam pembangunan ekonomi dan memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan ekonomi publik. Pasar diatur melalui instrumen kebijakan yang dibuat oleh elite ekonomi dan birokrat yang merumuskan kebijakan dalam sektor manufaktur yang terkenal dengan tingkat produktivitas yang tinggi (Kasahara, 2013, pp. 4-5).

Selain itu pemberian proteksi berupa pemberian insentif pajak, penunjukkan langsung IKM-IKM daerah sebagai basis produksi dan penunjukkan perusahaan Krakatau Steel sebagai pemasok bahan baku baja, menunjukkan pentingnya arahan dan penekanan dari Pemerintah kepada setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan mobil pedesaan. Namun, di karenakan perekonomian Indonesia yang sudah terintegrasi dengan perdagangan liberal dunia global, sehingga sudah tidak memungkinkan kembali bagi Indonesia untuk memberikan proteksi industri secara penuh. Sehingga *Developmental State* mengharapkan Negara menyesuaikan keadaan perdagangan internasional tersebut dan terus memfasilitasi proses restruksturisasi mobil pedesaan ini sehingga lebih efisien dan meningkatkan penekanan dengan cara lain seperti insentif, pengurangan pajak, dan penunjukkan produsen dalam negeri.

Hal ini juga berlaku bagi para aktor non-pemerintah yang juga diintervensi atau dilibatkan dalam kebijakan pengembangan industri sektor mobil pedesaan ini. Aktor non-negara ini berperan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh Pemerintah yang dicetuskan dalam bentuk kebijakan resmi untuk mengembangkan industri otomotif mobil pedesaan.

a. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia memprogramkan mobil pedesaan sebagai kebijakan bagi perkembangan industri sektor otomotif nasional sekaligus secara resmi memperkenalkan kendaraan pedesaan ini (Stephanie, 2018). Presiden memiliki kemampuan untuk membuat fokus perencanaan pembangunan nasional kedepannya, dengan tujuan untuk memajukan industri mobil pedesaan. Presiden Joko Widodo juga dapat menyatakan untuk mengawal kebijakan industri mobil pedesaan sehingga menjadi sektor yang strategis.

Dapat dilihat bahwa Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi eksekutif negara memiliki otoritas dalam menentukan industri apa saja yang menjadi prioritas untuk dijalankan, memberikan kebijakan-kebijakan sekunder yang dimaksudkan untuk melindungi dan mendukung kebijakan industri mobil pedesaan (contoh: Kebijakan proteksi industri seperti pemberian subsidi, dll), menunjuk kementerian-kementerian di bawah pemerintahannya untuk menjalankan kebijakan mobil pedesaan ini, hingga memperkenalkan industri baru ini kepada masyarakat untuk mendapat dukungan.

b. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian memiliki otoritas dalam mengarahkan industri sumber daya terkait di dalam negeri sesuai dengan instruksi Presiden untuk mengembangkan industri otomotif mobil pedesaan. Kebijakan yang diambil Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian Indonesia seperti menggulirkan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi menuju era industri 4.0, dengan tujuan meningkatkan SDM di politeknik-politeknik (Politeknik Logam Morowali, Politeknik Kayu dan Pengolahan Kayu Kendal, Politeknik Industri Petrokimia Cilegon, dan lainnya) dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga ahli industri mobil pedesaan (Kemenperin, 2018).

Kemenperin juga menunjuk dan menyiapkan PT. Krakatau Steel selaku penyedia bahan baku baja untuk mensuplai kebutuhan industri otomotif mobil pedesaan (Jati, 2016). Kemenperin juga bekerja sama dengan Kemenperin dalam mencetuskan kebijakan Insentif fiskal dan non-fiskal bagi produsen yang memproduksi dan merakit kendaraan pedesaan kepada menteri Keuangan (Purnama R. , 2017).

Kemenperin juga memiliki kewenangan menunjuk langsung IOI selaku koordinator dalam memproses purwarupa kendaraan yang akan diproduksi oleh industri, kewenangan untuk memilih pelaku industri otomotif dalam negeri yang akan melakukan pengembangan produk (Kemenperin, 2017).

Otoritas untuk menunjuk tiap-tiap elemen pemasok bahan baku, pengembang, hingga tercapainya produksi mobil pedesaan ini adalah wewenang dari Kemenperin.

Kemenperin juga melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan dalam menyusun peraturan kementrian terkait pemberian insentif agar dapat menarik minat produsen dalam negeri berlomba-lomba memproduksi industri mobil pedesaan, dan memberikan pajak yang rendah berdasarkan bagi masyarakat yang membeli dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri mobil pedesaan tersebut (Kemenperin, 2018). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mewacanakan kebijakan peniadaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi hasil produksi industri mobil pedesaan dalam negeri. Dengan menghilangkan PPnBM pada penjualan mobil pedesaan, diharapkan harga mobil dapat lebih murah sehingga terjangkau bagi masyarakat desa yang membutuhkan mobil pedesaan dalam mengerjakan pekerjaanya (Sudarsono, 2018).

Melihat dari kedua poin di atas, dapat diketahui siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam mengembangkan industri otomotif mobil pedesaan di masa Presiden Joko Widodo ini. Selain dari pihak Pemerintah selaku pihak eksekutif negara, aktor-aktor lain di luar pemerintahan juga turut dilibatkan dalam pengembangan industri ini. Pemerintah selaku pembuat kebijakan, berupaya mengeluarkan keputusan untuk mendukung pengembangan industri ini dengan memanfaatkan seluruh elemen-elemen yang terdapat di dalam industri otomotif dalam negeri. Pihak-pihak non-negara seperti lembaga riset IOI yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian yang bertugas untuk meriset dan mengawasi berjalannya industri otomotif nasional diarahkan oleh Pemerintah demi tercapainya tujuan nasional. Batasan dan wewenang dari Presiden Joko

Widodo dan Menteri Perindustrian telah sesuai dengan indikator *Relative Autonomy of The Developmental State* yang terdapat dalam teori *Developmental States,* yang menjelaskan bahwa negara harus mengesampingkan keinginan beberapa pihak yang sekiranya tidak diuntungkan agar dapat mencapai tujuannya yang sesuai dengan kebijakan yang ingin diterapkan terkait kebijakan industri mobil pedesaan (Leftwich, 1995).